

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di setiap negara, peran penduduk sangat penting sebagai salah satu modal dasar dalam tercapainya pembangunan yang berkelanjutan. Penduduk yang berkualitas baik secara rohani dan jasmani tentunya akan sangat membantu dalam tahapan pembangunan. Penduduk akan mengambil peran sebagai objek sekaligus subjek dalam pembangunan. Sebagai objek pembangunan, penduduk menjadi penikmat dari output akhir pembangunan, dan sebagai subjek pembangunan, penduduk dapat mengambil peran sebagai individu yang dapat berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan ekonomi. Sama halnya dengan negara lain, Indonesia sebagai salah satu negara berkembang juga termasuk negara yang membutuhkan peran penduduk dalam tahapan pembangunan yang berkelanjutan dan dapat mengambil bagian dalam aktivitas kegiatan ekonomi.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki laju pertumbuhan penduduk tertinggi di dunia. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk Indonesia telah mencapai 275.5 juta jiwa di tahun 2022. Angka tersebut membawa Indonesia menempati urutan keempat dengan populasi terbanyak setelah India, China dan Amerika Serikat. Sejalan dengan peningkatan pertumbuhan penduduk tersebut tentunya akan sangat memengaruhi pertumbuhan angkatan kerja. Dimana jumlah penduduk yang semakin besar telah membawa akibat jumlah angkatan kerja yang semakin besar pula (Mulyadi.S, 2014).

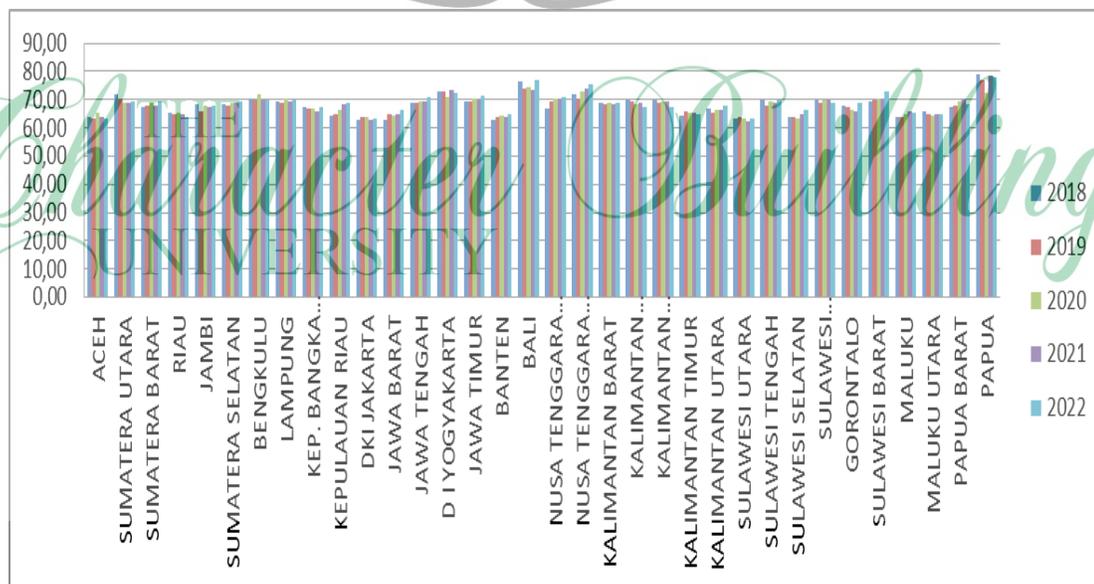
Namun, permasalahan yang muncul dengan pertumbuhan angkatan kerja adalah wadah untuk angkatan kerja juga harus tumbuh seiring dengan pertumbuhan angkatan kerja (Natalia, 2012). Hal ini akan menjadi tantangan serius dalam penyediaan lapangan pekerjaan sebagai wadah bagi para angkatan kerja untuk bekerja. Karena, apabila lapangan kerja yang ada tidak dapat mencukupi maka jumlah angkatan kerja yang semakin lama semakin bertambah itu akan menyebabkan jumlah pengangguran bertambah banyak yang pada akhirnya hanya akan menjadi beban pembangunan nasional yang lebih berat bagi negara. Dalam hal ini, dapat dipahami bahwa meningkatnya jumlah angkatan kerja sebagai pemicu tingginya tingkat partisipasi angkatan kerja telah mencerminkan banyaknya tenaga kerja atau jumlah angkatan kerja.

ILO (*International Labour Organization*) merumuskan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) atau *labour force participation rate* (LFPR) adalah ukuran proporsi penduduk usia kerja di suatu negara yang terlibat aktif dalam sektor pasar tenaga kerja, baik dengan bekerja maupun mencari pekerjaan terhadap populasi penduduk usia kerja. TPAK menghitung jumlah orang dalam angkatan kerja sebagai persentase dari penduduk usia kerja. Angkatan kerja adalah jumlah dari orang yang bekerja dan tidak bekerja; sedangkan populasi penduduk usia kerja adalah penduduk di atas usia kerja legal (biasanya 15 tahun ke atas) (ILO, 2016).

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang memiliki isu angkatan kerja yang menarik untuk diteliti. hal ini dikarenakan angkatan kerja di Indonesia yang terus bertambah seiring meningkatnya jumlah penduduk. Selain itu angkatan kerja menjadi

salah satu aspek penting untuk terlibat dalam proses pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Semakin tinggi tingkat partisipasi angkatan kerja maka akan menunjukkan bahwa semakin tinggi pula angkatan kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu kegiatan ekonomi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022, Perkembangan tingkat partisipasi angkatan kerja di Indonesia selama 5 tahun terakhir baik sebelum maupun setelah pandemi Covid-19 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dimana sebelum pandemi di tahun 2019 tingkat partisipasi angkatan kerja di Indonesia masih berada di 67,53% dan setelah pandemi Covid-19 di tahun 2022, tingkat partisipasi angkatan kerja di Indonesia mengalami peningkatan menjadi 68,63% dengan kata lain meningkat 1,1%. Berikut ini perkembangan tingkat partisipasi angkatan kerja di Indonesia dalam 5 (lima) tahun terakhir di tahun 2018-2022 dapat dilihat dalam gambar grafik berikut:



Gambar 1.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Setiap Provinsi di Indonesia (Persen)

Berdasarkan gambar 1.1 diatas dapat dilihat bahwa kondisi tingkat partisipasi angkatan kerja setiap provinsi di Indonesia tahun 2018-2022 selalu mengalami tren peningkatan dari tahun ke tahun. Akan tetapi, meskipun rata-rata tingkat partisipasi angkatan kerja di Indonesia cenderung meningkat ternyata disetiap provinsi tingkat partisipasi angkatan kerja mengalami perbedaan yang cukup kontras antara satu dengan yang lain. Selama periode tahun 2018-2022, Provinsi Papua menempati posisi pertama dengan tingkat partisipasi angkatan kerja tertinggi. Di tahun 2022, tingkat partisipasi angkatan kerja di Provinsi Papua sudah berada di angka 77,75%.

Tingkat partisipasi angkatan kerja yang cenderung meningkat di Provinsi Papua dikarenakan bertambahnya jumlah penduduk di provinsi tersebut setiap tahunnya sehingga mengindisikan penduduk usia kerja juga bertambah dan sekaligus menambah angkatan kerja. Angka tersebut cukup timpang bila dibandingkan dengan Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Sulawesi Utara yang memiliki tingkat partisipasi angkatan kerja terendah di tahun 2022 yakni masing-masing sebesar 63,08%. Rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja di dua wilayah tersebut disebabkan oleh kecilnya kesempatan kerja yang tersedia bagi penduduk usia kerja dikarenakan persaingan yang sangat ketat dan kualifikasi angkatan kerja yang tidak sesuai dengan yang dibutuhkan pasar kerja sehingga menimbulkan angkatan kerja lebih banyak menganggur atau sama sekali tidak bekerja.

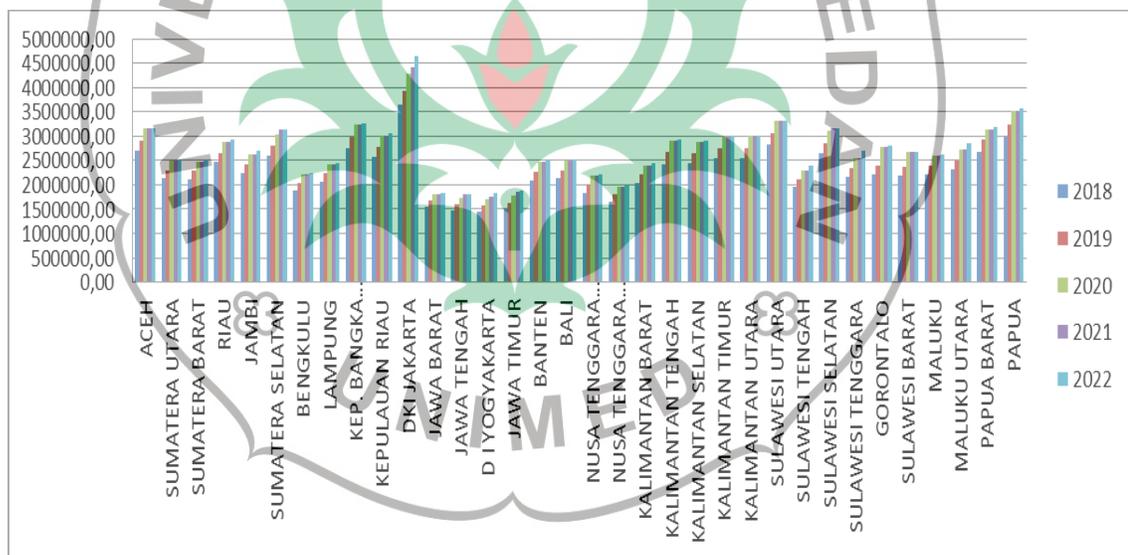
Meningkat atau menurunnya tingkat partisipasi angkatan kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah penduduk yang masih berstatus pelajar dan

masih mengurus rumah tangga, pendapatan, umur, upah, pendidikan dan kegiatan ekonomi (Simanjuntak, 2001). Adapun faktor-faktor yang difokuskan dalam penelitian ini adalah upah, pendidikan dan pertumbuhan ekonomi.

Faktor upah menjadi salah satu variabel yang kerap dikaitkan dengan tingkat partisipasi angkatan kerja. Upah diartikan sebagai pembayaran atas jasa fisik maupun mental yang telah disediakan untuk tenaga kerja oleh pengusaha/pemberi kerja (Sukirno, 2013). Diberbagai negara baik di negara maju maupun negara berkembang menunjukkan bahwa upah para pekerja berkaitan erat dengan produktivitas. Hal ini terjadi karena tingkat upah dapat mempengaruhi orang untuk masuk atau tidaknya kedalam pasar tenaga kerja.

Keterkaitan upah terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja menjelaskan bahwa tingkat upah mempengaruhi penyediaan angkatan kerja. Namun demikian, kenaikan tingkat upah mempengaruhi angkatan kerja melalui dua arah yang saling berlawanan. Dari sisi *income effect*, kenaikan tingkat upah dapat menyebabkan pendapatan meningkat sehingga cenderung untuk mengurangi tingkat partisipasi angkatan kerja. Sedangkan di sisi *substitution effect*, peningkatan upah membuat harga waktu menjadi relatif mahal sehingga pekerjaan menjadi lebih menarik dan menggantikan waktu senggang dengan bekerja. Sehingga daya substitusi dari kenaikan upah ini mendorong peningkatan tingkat partisipasi angkatan kerja. Pengamatan menunjukkan bahwa hasil akhir dari dua pengaruh tersebut *income effect* dan *substitution effect* tergantung dari batas tinggi rendahnya tingkat upah yang sedang berlaku (Simanjuntak, 2001).

Di Indonesia, penetapan upah dilakukan dengan penuh pertimbangan di setiap tahunnya baik dari sisi perusahaan maupun tenaga kerja. penetapan upah yang dimaksud dikenal dengan istilah upah minimum provinsi (UMP). Upah minimum provinsi setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan. Untuk mengetahui lebih rinci mengenai perkembangan upah minimum provinsi di Indonesia dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Gambar 1.2 Upah Minimum Provinsi (UMP) Setiap Provinsi di Indonesia (Rupiah)

Dari gambar 1.2 dapat dilihat bahwa upah minimum provinsi di 34 provinsi Indonesia selalu meningkat. Peningkatan upah tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah turut serta dalam menjamin terpenuhinya hak para pekerja dan memperhatikan standar upah yang layak. Namun, peningkatan upah minimum provinsi di setiap tahunnya berbanding terbalik dengan kondisi tingkat partisipasi angkatan kerja. Dimana berdasarkan data diatas, provinsi yang memiliki upah minimum tertinggi

di tahun 2022 adalah Provinsi DKI Jakarta yakni Rp4.641.854, namun jika dilihat dari gambar 1.1 tingkat partisipasi angkatan kerja di Provinsi DKI Jakarta masih berada di angka paling rendah yakni 63,08%. Sedangkan upah minimum terendah adalah Provinsi Jawa Tengah yakni Rp1.812.935, tetapi tingkat partisipasi angkatan kerja justru tergolong tinggi yakni 70,84%.

Secara teori, upah yang cenderung meningkat mempunyai hubungan yang signifikan terhadap peningkatan angkatan kerja. Berdasarkan gambar 1.2 menunjukkan bahwa kondisi upah minimum provinsi mengalami perubahan dengan kecenderungan meningkat setiap tahun di 34 provinsi Indonesia seperti upah minimum provinsi Riau tahun 2021 adalah Rp2.888.564 kemudian meningkat di tahun 2022 menjadi Rp2.938.564, diikuti dengan Provinsi Kalimantan Selatan yang juga mengalami peningkatan dari Rp2.877.448 di tahun 2021 menjadi Rp2.906.473 di tahun 2022 dan provinsi lain juga mengalami peningkatan. Akan tetapi, peningkatan ini berbanding terbalik dengan kondisi tingkat partisipasi angkatan kerja di tahun yang sama justru mengalami penurunan (gambar 1.1).

Upah melatarbelakangi seseorang untuk memutuskan akan memasuki dunia kerja dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik kebutuhan sandang, pangan maupun papan. Meningkatnya upah setiap tahunnya memiliki dasar pertimbangan yang cukup matang untuk memastikan upah memungkinkan kehidupan yang layak bagi para pekerja dan tidak memberatkan pengusaha atau perusahaan. Selain itu meningkatnya upah juga dilihat dengan mempertimbangkan produktivitas tenaga kerja, dan tingkat inflasi di suatu wilayah.

Kajian yang mengkaitkan antara upah minimum provinsi dengan tingkat partisipasi angkatan kerja sudah ada yang meneliti sebelumnya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa upah minimum provinsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja, seperti pada penelitian sebelumnya yaitu Surbakti dkk (2023) dan Zuhrotul Aini, Bq. Saripta W (2022). Namun ternyata, hasil riset ini juga bertentangan dengan riset lainnya, Maulana dkk (2022) dan Rukmana (2019) menyimpulkan bahwa upah minimum provinsi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja. Serta hasil penelitian Prenggondani (2016) yang menyatakan bahwa upah minimum provinsi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja. Tentunya kesenjangan hasil riset antar peneliti ini menjadi kajian menarik untuk mengungkap lebih jauh kaitan upah minimum provinsi terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja khususnya yang terjadi di tiap provinsi Indonesia.

Selain upah, variabel pendidikan juga merupakan variabel yang dapat mempengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja. Todaro (2008) menyatakan bahwa pendidikan merupakan tujuan pembangunan yang paling mendasar. Menurut Nasution dkk (2021), pendidikan umumnya merupakan investasi sumber daya manusia. Pendidikan memberikan sumbangan yang besar terhadap perkembangan kehidupan sosial ekonomi melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, kecakapan, sikap serta produktivitas.

Di Indonesia program pendidikan wajib 12 tahun merupakan salah satu upaya yang gesit dilakukan untuk meningkatkan produktivitas sumber daya manusia dimasa

depan dengan harapan perkembangan pengetahuan seseorang ditingkat pendidikannya semakin tinggi, dan lamanya menempuh pendidikan akan memiliki kesempatan kerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan pendidikan yang lebih rendah.

Sehingga melalui hal ini dinyatakan bahwa proporsi penduduk yang sudah memasuki usia kerja atau tergolong angkatan kerja (TPAK) akan meningkat sesuai dengan meningkatnya tingkat pendidikan yang ditempuh serta lamanya menempuh pendidikan akan memiliki peluang kesempatan kerja yang lebih baik. Apabila tingkat pendidikan seseorang semakin tinggi maka semakin baik pula tingkat produktivitas seseorang tersebut. Seseorang yang memiliki pendidikan yang tinggi akan memiliki pengetahuan atau wawasan yang luas (Simanjuntak, 2001).

Berdasarkan pernyataan diatas rata-rata lama pendidikan mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja, semakin lama atau semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin besar peluang individu tersebut memiliki kesempatan kerja yang tinggi melalui wawasan dan pengetahuan yang luas. Hal ini terjadi karena semakin berpendidikan seseorang, maka semakin besar alternatif individu tersebut untuk memperoleh pekerjaan. Berikut ini untuk mengetahui perkembangan pendidikan yang ada di Indonesia dapat dilihat dari rata-rata lama sekolah yang disajikan dalam bentuk gambar dibawah ini:



Gambar 1.3 Rata-rata lama sekolah Setiap Provinsi di Indonesia (Tahun)

Dari gambar 1.3 dapat dilihat bahwa pendidikan melalui rata-rata lama sekolah di 34 provinsi yang ada di Indonesia selalu meningkat. Peningkatan ini menjadi bukti bahwa penduduk semakin peduli dan menyadari pentingnya pendidikan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kognitif yang lebih baik. Namun, peningkatan pendidikan melalui rata-rata lama sekolah disetiap tahunnya di tiap provinsi berbanding terbalik dengan kondisi tingkat partisipasi angkatan kerja.

Berdasarkan data diatas provinsi yang memiliki rata-rata lama sekolah tertinggi di tahun 2022 adalah Provinsi DKI Jakarta yakni 11,31 tahun. Namun, jika dilihat pada gambar 1.1 tingkat partisipasi angkatan kerja di Provinsi DKI Jakarta masih berada di angka paling rendah yakni 63,08%. Sedangkan rata-rata lama sekolah terendah adalah Provinsi Papua yakni 7,02 tahun tetapi Provinsi Papua justru menempati posisi teratas dengan tingkat partisipasi angkatan kerja tertinggi yakni 77,75 %.

Secara teori, meningkatnya pendidikan melalui rata-rata sekolah yang ditempuh

memiliki korelasi positif terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja. Artinya semakin lama pendidikan yang ditempuh yang dilihat dari rata-rata lama sekolah maka akan meningkatkan tingkat partisipasi angkatan kerja. Berdasarkan pada gambar 1.3 menunjukkan bahwa pendidikan melalui rata-rata lama sekolah mengalami peningkatan setiap tahun seperti Provinsi Sulawesi Tenggara, tahun 2021 rata-rata lama sekolah di provinsi tersebut adalah 9,13 tahun kemudian pada tahun 2022 meningkat menjadi 9,25 tahun, diikuti dengan Provinsi Papua Barat juga mengalami peningkatan yakni tahun 2021 rata-rata lama sekolah sebesar 7,69 tahun menjadi 7,84 tahun di tahun 2022 dan provinsi lain juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Namun, peningkatan ini berbanding terbalik dengan kondisi tingkat partisipasi angkatan kerja di tahun yang sama justru mengalami penurunan (gambar 1.1). Seharusnya di tahun tersebut tingkat partisipasi angkatan kerja mengalami kenaikan dikarenakan meningkatnya pendidikan yang dilihat dari rata-rata lama sekolah.

Mutu pendidikan sangat perlu bagi setiap penduduk, dikarenakan semakin banyak penduduk yang menempuh pendidikan, maka semakin tinggi produktivitas dan ekonomi nasional akan bertumbuh dengan baik. Selain itu, seseorang yang berhasil menamatkan pendidikannya yang cukup untuk memasuki pasar tenaga kerja sektor modern mempunyai kemungkinan yang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan yang berpenghasilan tinggi daripada seseorang yang tidak menamatkan pendidikannya (Todaro, 1993).

Kajian yang mengkaitkan antara pendidikan dengan tingkat partisipasi angkatan kerja sudah ada yang meneliti sebelumnya. beberapa penelitian menunjukkan

bahwa pendidikan melalui rata-rata lama sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja seperti pada penelitian sebelumnya yaitu Maulana dkk (2022) dan Wahyuningtias (2019). Namun ternyata, hasil riset ini juga bertentangan dengan riset lainnya yakni Wahyuni dkk (2019) dan Bonerri dkk (2018) yang menyatakan bahwa pendidikan melalui rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja. Serta hasil penelitian, Haspa dkk (2023) yang menyatakan pendidikan melalui rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja. Tentunya kesenjangan hasil riset antar peneliti ini menjadi kajian menarik untuk mengungkap lebih jauh kaitan pendidikan melalui rata-rata lama sekolah dengan tingkat partisipasi angkatan kerja secara menyeluruh di provinsi Indonesia

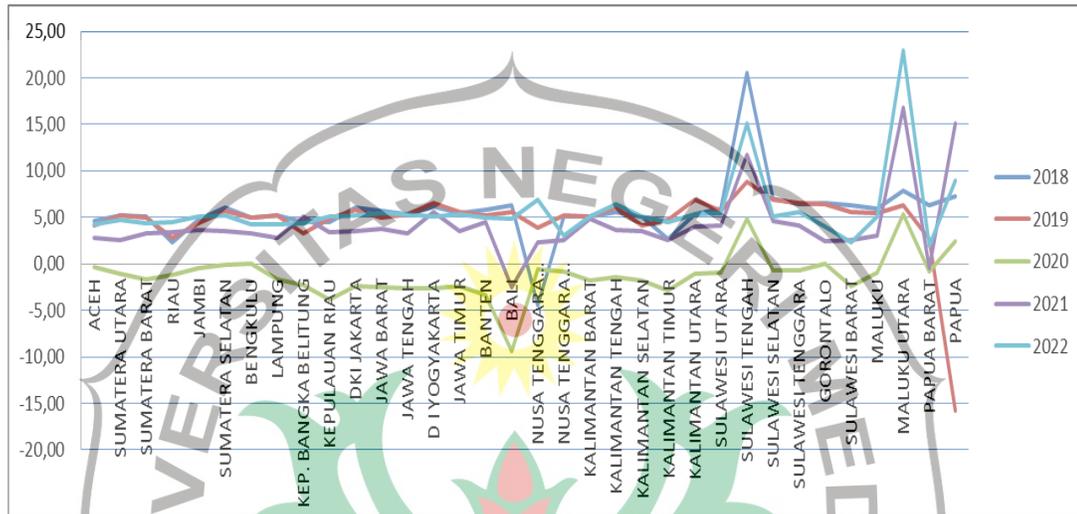
Selain faktor pendidikan, faktor lain yang juga kerap mempengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu istilah yang menerangkan atau mengukur prestasi dari perkembangan ekonomi (Sukirno, 2015). Selain itu pertumbuhan ekonomi juga merupakan proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang yang menekankan tiga hal yaitu proses, output perkapita dan jangka panjang. Definisi tersebut juga menyiratkan bahwa aktivitas perekonomian berkembang dan berubah dari waktu ke waktu (Prawoto, 2019).

Pertumbuhan ekonomi digambarkan dengan kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB). Data PDB digunakan sebagai bahan untuk merefleksikan kondisi makroekonomi dan menjadi alat yang paling dekat untuk memantau kondisi statistik ekonomi dikarenakan PDB merupakan salah satu cara perhitungan terbaik untuk

mengukur kesejahteraan ekonomi masyarakat (Mankiw, 2018). Sehingga secara garis besar dapat diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi menggambarkan kenaikan PDB dan digunakan untuk mengukur keadaan ekonomi yang tengah berlangsung dan PDRB harga konstan digunakan sebagai ukuran pertumbuhan ekonomi untuk cakupan daerah.

Keterkaitan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja dilihat melalui kegiatan ekonomi yang berlangsung. Dimana kegiatan ekonomi dalam program pembangunan di satu pihak menuntut keterlibatan lebih banyak orang untuk ikut terlibat. Di pihak lain program pembangunan membutuhkan harapan-harapan baru. Seperti harapan untuk dapat ikut menikmati hasil pembangunan tersebut. Jadi, meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui kegiatan ekonomi akan mempengaruhi peningkatan tingkat partisipasi angkatan kerja (Simanjuntak, 2001).

Dalam hal ini output pertumbuhan ekonomi disuatu negara diharapkan dapat meningkatkan lapangan pekerjaan sehingga dapat meningkatkan partisipasi angkatan kerja bertambah besar. Hal ini sama halnya dengan Indonesia sebagai negara berkembang yang memiliki pertumbuhan angkatan kerja yang cepat berkembang seiring bertambahnya jumlah penduduk dan tentunya akan dibutuhkan dalam meningkatkan kegiatan ekonomi. Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia secara rinci dijelaskan dalam bentuk gambar berikut ini:



Gambar 1.4. Laju Pertumbuhan Ekonomi Setiap Provinsi Indonesia Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Persen)

Dari gambar 1.4 dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi setiap provinsi di Indonesia tahun 2018-2022 mengalami fluktuasi setiap tahunnya dengan penurunan yang paling tajam pada tahun 2020. Fluktuasi ini dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi yang berbeda-beda di tiap wilayah dan pencapaian target pertumbuhan ekonomi yang berbeda di setiap tahunnya. Dan untuk fenomena penurunan pertumbuhan ekonomi yang tajam di tahun 2020 disebabkan oleh pandemi yang melanda dunia yaitu virus Covid-19 yang menyebabkan kegiatan ekonomi lesu dan mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi yang sangat drastis.

Berdasarkan data diatas, selama periode 2018-2022 laju pertumbuhan ekonomi di tiap provinsi sudah mengalami tren peningkatan setelah pandemi Covid-19. Namun, peningkatan pertumbuhan ekonomi di tiap provinsi berbanding terbalik dengan kondisi tingkat partisipasi angkatan kerja. Dimana tahun 2022, provinsi yang memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah Provinsi Maluku Utara yakni 22,94%, namun

jika dilihat pada gambar 1.1 tingkat partisipasi angkatan kerja di Provinsi Maluku Utara masih berada di angka 64,93%. Sedangkan pertumbuhan ekonomi terendah adalah Provinsi Papua Barat yakni 2,01% tetapi Provinsi Papua Barat justru memiliki tingkat partisipasi angkatan kerja yang tergolong tinggi yakni 68,69%.

Secara teori, variabel pertumbuhan ekonomi memiliki korelasi positif terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja. Artinya naiknya pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan tingkat partisipasi angkatan kerja. Pada gambar 1.4 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan yang cukup signifikan di tahun 2022 hampir seluruh provinsi Indonesia seperti pada Provinsi Aceh, tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh sebesar 2,79% kemudian meningkat pada tahun 2022 menjadi 4,21%, diikuti dengan Provinsi Kalimantan Tengah yang juga mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi dari 3,59% tahun 2021 meningkat menjadi 6,45% di tahun 2022 dan provinsi lain juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Namun, peningkatan ini berbanding terbalik dengan kondisi tingkat partisipasi angkatan kerja di tahun yang sama justru mengalami penurunan (gambar 1.1). Seharusnya di tahun tersebut tingkat partisipasi angkatan kerja mengalami kenaikan dikarenakan meningkatnya pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi sering dijadikan acuan sebagai indikator keberhasilan ekonomi di suatu wilayah. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi membawa dampak positif diberbagai aspek termasuk penyerapan tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. Oleh sebab itu, pemerintah sebagai pemangku kebijakan dan pelopor penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi selalu berupaya agar pertumbuhan

ekonomi selalu meningkat setiap tahunnya dan berupaya meningkatkan kesempatan kerja yang besar sebagai wadah bagi para angkatan kerja untuk bekerja.

Kajian yang mengkaitkan antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat partisipasi angkatan kerja sudah ada yang meneliti sebelumnya. beberapa penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja seperti pada penelitian sebelumnya yaitu Mumekeh dkk (2023) dan Sari dkk (2018). Namun ternyata, hasil riset ini juga bertentangan dengan riset lainnya dimana Nuni (2019) dan Wahyuningtias (2019) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja. Serta hasil penelitian Rukmana (2019) yang menyatakan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja. Tentunya kesenjangan hasil riset antar peneliti ini menjadi kajian menarik untuk mengungkap lebih jauh kaitan pertumbuhan ekonomi dengan tingkat partisipasi angkatan kerja khususnya di tiap provinsi Indonesia.

Berbagai pendapat ahli dan hasil riset empiris mengaitkan antara upah minimum provinsi, pendidikan dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja. Namun, beragam hasil riset peneliti sebelumnya menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan (*research gap*), bahkan berlawanan dengan arah teori. Mempertimbangkan bahwa upah minimum provinsi, pendidikan, pertumbuhan ekonomi dan tingkat partisipasi angkatan kerja merupakan masalah yang umum dan sering menjadi topik yang hangat dibicarakan setiap saat di tengah-tengah kehidupan masyarakat, maka masalah tingkat partisipasi angkatan kerja dengan segala faktor yang

mempengaruhinya ini semakin menarik untuk dikaji lebih lanjut secara mendalam di setiap provinsi Indonesia.

Berdasarkan serangkaian persoalan empiris, teoritis dan fenomena yang dipaparkan, peneliti tertarik untuk membahas serta melakukan penelitian yang berkaitan dengan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja di Indonesia.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah dijelaskan, ditemukan masalah sebagai berikut:

1. Selama periode 2018-2022 tingkat partisipasi angkatan kerja di Indonesia terus meningkat. Namun demikian, skor tingkat partisipasi angkatan kerja di setiap provinsi mengalami kesenjangan khususnya Provinsi DKI Jakarta sebagai pusat ibukota masih berada di angka paling rendah yakni 63,08% pada tahun 2022.
2. Upah minimum provinsi yang cenderung meningkat di setiap provinsi belum mampu menyerap angkatan kerja. Seperti Provinsi DKI Jakarta yang merupakan provinsi yang memiliki upah tertinggi hingga tahun 2022 yakni sebesar Rp 4.641.854. Namun, jika dilihat tingkat partisipasi angkatan kerja di provinsi tersebut masih berada di angka paling rendah yakni 63,08%.
3. Pendidikan yang meningkat di setiap provinsi belum mampu berorientasi terhadap peningkatan angkatan kerja. Seperti Provinsi DKI Jakarta yang merupakan provinsi yang memiliki rata-rata lama sekolah tertinggi hingga tahun 2022 yaitu sebesar

11,31 tahun, namun jika dilihat tingkat partisipasi angkatan kerja di provinsi tersebut masih berada di angka paling rendah yakni 63,08%

4. Pertumbuhan ekonomi yang mengalami peningkatan di setiap provinsi tidak diikuti dengan penyerapan angkatan kerja. Seperti Provinsi Maluku Utara yang merupakan provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di tahun 2022 sebesar 22,94%, namun jika dilihat tingkat partisipasi angkatan kerja di provinsi tersebut masih berada di angka yang cukup rendah yakni 64,93%.

1.3 Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini diberikan batasan-batasan masalah agar proses analisis lebih terpusat dan terkoordinasi, batasan-batasan tersebut antara lain:

1. Penelitian ini menggunakan variabel dependen yakni Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) serta variabel independen adalah Upah Minimum Provinsi, Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi tahun 2018-2022.
2. Data variabel yang digunakan adalah data dari 34 provinsi yang ada di Indonesia.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh Upah Minimum Provinsi terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) setiap provinsi di Indonesia?
2. Apakah terdapat pengaruh Pendidikan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) setiap provinsi di Indonesia?

3. Apakah terdapat pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) setiap provinsi di Indonesia?
4. Apakah terdapat pengaruh Upah Minimum Provinsi, Pendidikan, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) setiap provinsi di Indonesia?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditulis, maka tujuan dari penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh Upah Minimum Provinsi terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) setiap provinsi di Indonesia.
2. Untuk menganalisis pengaruh Pendidikan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) setiap provinsi di Indonesia.
3. Untuk menganalisis pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) setiap provinsi di Indonesia.
4. Untuk menganalisis pengaruh Upah Minimum Provinsi, Pendidikan, dan Pertumbuhan Ekonomi secara simultan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) setiap provinsi di Indonesia.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pembelajaran yang

bermanfaat dalam menambah pengetahuan dan wawasan yang berkaitan dengan pengaruh upah minimum provinsi, pendidikan dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja di Indonesia serta dapat menjadi rujukan bagi masyarakat yang membutuhkan.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Bagi peneliti, memberikan bukti empiris tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi Angkatan kerja di Indonesia.
2. Bagi mahasiswa, sebagai informasi mengenai tingkat partisipasi angkatan kerja khususnya mahasiswa/i yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut dengan topik yang sama mengenai tingkat partisipasi angkatan kerja.
3. Bagi Universitas, untuk menambah referensi ilmu pengetahuan pada perpustakaan Universitas Negeri Medan untuk dijadikan bahan pembelajaran pada masa yang akan datang khususnya mahasiswa/i jurusan ekonomi.
4. Bagi Pemerintah, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi lembaga tertentu tertentu dalam pengambilan keputusan secara khusus terkait angkatan kerja.